

Persepsi Masyarakat Terhadap Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Masyarakat Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie)

Leni Safira ^a, Khairul Amri ^{b*}, Hafidhah ^c

^{a,b*,c} Jalan Lingkar Kampus UIN Ar-Raniry Aceh, Darussalam, Kota Banda Aceh, Indonesia.

ABSTRACT

Direct Village Fund Cash Assistance (BLT-Dana Desa) is financial assistance to poor families in villages sourced from the Village Fund to reduce the impact of the COVID-19 pandemic in improving the family economy. This study aims to determine the process of distributing Cash Direct Assistance (BLT) and public perceptions of Cash Direct Assistance (BLT) funds in an effort to improve the family economy according to the perspective of Islamic economics in Glumpang Baro sub-district, Pidie district. This research is a quantitative research. The results of the study found that the dimensions of perceived benefits became the most important perceptions in improving the community's economy, then the dimensions of perceptions of justice and dimensions of perceptions of information disclosure and the dimensions of perception of the distribution process were in the last order. The results of the Man-Whitney test indicate that differences in age, occupation, marital status, education level and frequency of receiving BLT do not cause differences in people's perceptions in improving the family economy according to an Islamic economic perspective.

ABSTRAK

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Persepsi masyarakat terhadap dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam upaya meningkatkan perekonomian keluarga menurut perspektif ekonomi Islam di kecamatan Glumpang Baro kabupaten Pidie. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa dimensi persepsi manfaat menjadi persepsi paling utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, selanjutnya dimensi persepsi keadilan dan dimensi persepsi keterbukaan informasi dan dimensi persepsi proses penyaluran berada urutan terakhir. Hasil uji Man-Whitney mengindikasikan perbedaan umur, pekerjaan, status perkawinan, tingkat pendidikan dan frekuensi menerima BLT tidak menyebabkan adanya perbedaan persepsi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian keluarga menurut perspektif ekonomi Islam.

ARTICLE HISTORY

Received 16 March 2024
Accepted 15 April 2024
Published 30 May 2024

KEYWORDS

Family Economy; BLT;
Community Perception; Islamic
Economic Perspective.

KATA KUNCI

Perekonomian Keluarga; BLT;
Persepsi Masyarakat; Perspektif
Ekonomi Islam.

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah bangsa di dunia, khususnya negara yang sedang berkembang. Di sisi lain negara yang maju sekalipun tidak berarti telah bebas dari kemiskinan. Salah satunya adalah negara sedang berkembang seperti Indonesia, pembangunan merupakan satu hal yang mutlak diperlukan. Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial, tidak hanya karena tendensinya yang semakin meningkat, namun juga konsekuensinya yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata namun juga masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri. Oleh karena itu, pengentasan masalah kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Pratama, 2014). Penduduk miskin merupakan masalah yang tidak pernah selesai, meskipun Indonesia sudah melaksanakan pembangunan nasional, regional serta mengutamakan pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bukan hanya sekedar usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga harus dapat memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Selanjutnya secara strategis tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan ketentraman hidup dapat dinikmati oleh semua masyarakat (Sudirman, 2014).

Kesejahteraan merupakan hal yang ingin dicapai semua orang, walaupun untuk mencapainya seseorang harus bekerja keras. Kesejahteraan memiliki banyak dimensi, yakni dapat dilihat dari dimensi materi dan dimensi non materi. Dari sisi materi dapat diukur dengan pendekatan pendapatan dan konsumsi Pemerintah baik pusat maupun daerah pasti memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya seperti yang tertera dalam UUD 1945. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu melalui pembangunan. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dan upaya yang dilakukan pemerintah melalui upaya seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang penting, strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih lengkap harus mengambil faktor yang relevan, dalam desentralisasi, analisis subnasional dapat menjadi pendekatan instruktif untuk memeriksa pemerintahan lokal dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan (Sunu & Utama, 2019).

Berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah yang diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program-program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kebijakan bersifat langsung yaitu berupa program yang langsung diberikan kepada penduduk miskin, contoh; Bantuan Langsung Tunai (BLT), raskin, sedangkan kebijakan tidak langsung, contoh; program jamkesmas, program IDT, BOS. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya namun kemiskinan tidak dapat dihilangkan seluruhnya, artinya fenomena kemiskinan dengan mudah dapat dijumpai di hampir seluruh wilayah baik di perkotaan maupun di pedesaan. Program kemiskinan yang saat ini dilakukan baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah umumnya hanya sementara, artinya program tersebut akan berjalan selama masih ada anggaran (dana), setelah dana habis maka selesai pula kegiatan program-program tersebut (Nurwati, 2008).

Aceh merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Hingga Maret 2019, jumlah penduduk miskin di daerah ini mencapai 819 ribu jiwa (15,32%) dan merupakan daerah dengan kemiskinan tertinggi di Sumatera. Secara nasional Aceh menempati peringkat 6 tertinggi setelah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Gorontalo. Sejalan dengan tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan di Aceh juga relatif tinggi, hingga semester kedua 2018 kini rasio Aceh sebesar 0,322 lebih besar dibandingkan dengan Sumatera Utara (0,315) dan Sumatera Barat (0,313). Tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Aceh, merupakan

tantangan bagi pemerintah Aceh dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini (Muliadi dan Amri, 2019).

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2020

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Simeulue	20,43	19,93	20,20	19,78	18,99	18,49
2. Aceh Singkil	21,72	21,60	22,11	21,25	20,78	20,20
3. Aceh Selatan	13,24	13,48	14,07	14,01	13,09	12,87
4. Aceh Tenggara	14,91	14,46	14,86	14,29	13,43	13,21
5. Aceh Timur	15,85	15,06	15,25	14,49	14,47	14,08
6. Aceh Tengah	17,51	16,64	16,84	15,58	15,50	15,08
7. Aceh Barat	21,46	20,38	20,28	19,31	18,79	18,34
8. Aceh Besar	15,93	15,55	15,41	14,47	13,92	13,84
9. Pidie	21,18	21,25	21,43	20,47	19,46	19,23
10. Bireuen	16,94	15,95	15,87	14,31	13,56	13,06
11. Aceh Utara	19,20	19,46	19,78	18,27	17,39	17,02
12. Aceh Barat Daya	18,25	18,03	18,31	17,10	16,26	15,93
13. Gayo Lues	21,95	21,86	21,97	20,70	19,87	19,32
14. Aceh Tamiang	14,57	14,51	14,69	14,21	13,38	13,08
15. Nagan Raya	20,13	19,25	19,34	18,97	17,97	17,70
16. Aceh Jaya	15,93	15,01	14,85	14,16	13,36	12,87
17. Bener Meriah	21,55	21,43	21,14	20,13	19,30	18,89
18. Pidie Jaya	21,40	21,18	21,82	20,17	19,31	19,19
19. Banda Aceh	7,72	7,41	7,44	7,25	7,22	6,90
20. Sabang	17,69	17,33	17,66	16,31	15,60	14,94
21. Langsa	11,62	11,09	11,24	10,79	10,57	10,44
22. Lhokseumawe	12,16	11,98	12,32	11,81	11,18	10,80
23. Subulussalam	20,39	19,57	19,71	18,51	17,95	17,60
Aceh	17,80	16,73	16,89	15,97	15,32	14,99

Sumber: BPS Aceh (2020)

Berdasarkan tabel 1, data kemiskinan di provinsi Aceh menurun pada tahun terakhir yaitu tahun 2020 dibandingkan dari tahun sebelumnya. Provinsi Aceh memiliki 23 kabupaten yang kemiskinannya berbeda-beda, namun terdapat lima kabupaten termiskin di Aceh yang pertama Aceh Singkil dengan presentase kemiskinan 20,20%, kedua Gayo Lues dengan presentase kemiskinan 19,32%, ketiga Pidie dengan presentase kemiskinan 19,23%, keempat Pidie Jaya dengan presentase kemiskinan 19,19% dan yang kelima Bener Meriah dengan presentase kemiskinan 18,89%. Maka dari itu penulis ingin meneliti bagaimana perekonomian di salah satu kecamatan di kabupaten Pidie yang mana kabupaten Pidie termasuk kedalam lima besar kabupten termiskin di Aceh. Pada tahun 2005 BLT pertama kali diterapkan, kemudian dilanjutkan pada tahun 2008 dan di 2013 namun dengan penyebutan yang berbeda, yaitu dari BLT

menjadi BLSM atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. BLT ini merupakan Bantuan dalam bentuk tunai dari pemerintah untuk mengkompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah (Sudirman, 2014). Kemudian BLT dilakukan kembali pada tahun 2020 sebagai upaya pemerintah untuk menekan dampak ekonomi pandemi COVID-19, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini juga di laksanakan di setiap daerah provinsi Aceh salah satunya di Kecamatan Glumpang Baro kabupaten Pidie.

Diawal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya virus COVID-19 yang tersebar di penjuru dunia. Terhitung mulai dari bulan februari 2020 terdeteksi kasus pertama COVID-19 di Indonesia, angka kasus positif COVID-19 terus mengalami kenaikan. Begitu banyaknya kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia pemerintah tentu tidak tinggal diam. Pemerintahan mulai bergotong-gotong untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19 ini semakin meluas. Salah satu kebijakan yang dimunculkan pemerintah yaitu melakukan gerakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masyarakat akrab dikenal dengan social distancing, munculnya kebijakan ini juga seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan 9/2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 sebagai pedoman pelaksanaan PSBB ini (Suari dan Giri, 2021). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLTDana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/ Wali Kota (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja
- 2) Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan)
- 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Kabupaten Pidie merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang termasuk kedalam lima kategori kabupaten termiskin menurut Tabel 1.1 diatas. Glumpang Baro adalah sebuah kecamatan di kabupaten Pidie yang terdiri dari 21 desa, dan kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang masyarakatnya mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di setiap desa. Masyarakat di kecamatan Glumpang Baro pada umumnya bekerja sebagai petani, buruh, pegawai, pengusaha dan pedagang. Perekonomian keluarga adalah sebuah aktivitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya terpenuhinya kebutuhan secara umum dapat dicapai melalui upaya kerja keras keluarga, baik suami maupun istri serta kerabat yang hidup dalam sebuah ikatan keluarga (rumah). Dalam pandangan Islam ekonomi harus dijalankan dengan cara islam yang mengatur kehidupan perekonomian, yaitu dengan ketelitian, cara berfikir yang berpangku pada nilai-nilai moral islam dan nilai-nilai ekonomi. Sebagaimana yang dikatakan Heri Sudarsono, ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang ilhami oleh nilai-nilai Islam (Sudarsono, 2002). Bantuan Langsung Tunai (bahasa Inggris: cash transfers) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash*

transfer) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan uang kepada keluarga miskin dan merupakan program kompensasi jangka pendek yang dikeluarkan oleh pemerintah serta tujuan utamanya adalah membantu masyarakat yang termasuk miskin dalam tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran. Dan rumah tangga termasuk sangat miskin, miskin dan dekat dengan miskin (*near poor*). Dengan ini walaupun program BLT bukan suatu program yang berkenaan dalam pemecahan masalah kemiskinan, akan tetapi diharapkan bisa mendorong untuk penanggulangan pada tingkat kemiskinan, pada saat terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan hidup masyarakat menuju keseimbangan yang baru (Selviana, 2016). Ada beberapa jenis dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu sebagai berikut:

- 1) Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Miskin Tahun 2005
 Pada tahun 2004, pemerintah memberi kebijakan untuk memotong subsidi BBM. Hal ini disebabkan karena penggunaan BBM bersubsidi ini tidak tepat sasaran, BBM bersubsidi lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang merupakan bukan sasaran dari subsidi BBM itu sendiri, yaitu pihak industri dan pihak-pihak yang mampu. Pemotongan subsidi BBM terus terjadi sampai tahun 2008 karena harga minyak kembali naik. Akibatnya dari kenaikan harga BBM, tentu berimbas kepada harga bahan-bahan pokok. Maka dari itu, dibuatkanlah kebijakan BLT ini sebagai upaya untuk menanggulangi dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat miskin, hal ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (Selviana, 2016).
- 2) Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Sasaran Tahun 2008
 Pada tahun 2008, terjadi kenaikan harga minyak mentah dunia yang semakin pesat, sehingga tidak ada pilihan lagi untuk pemerintah tidak menaikkan kembali harga BBM. Pemerintahpun terpaksa kembali melaksanakan program BLT melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran tanggal 14 Mei 2008. Program BLT yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp. 14,1 triliun dengan sasaran 91.1 juta rumah tangga. Program BLT-RTS ini memberikan uang tunai sejumlah Rp 100.000,- per bulan untuk satu rumah tangga miskin. Pendistribusian BLT dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan Desember 2008, BLT ini diberlakukan selama tujuh bulan (Selviana, 2016).
- 3) Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Pada Tahun 2013
 Pemerintah kembali menaikkan harga BBM jenis premium dan solar dari 4.500 rupiah menjadi masing-masing 6.500 dan 5.500 per liter di tahun 2013. Untuk mengantisipasi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat dan inflasi besar-besaran, khususnya bagi keluarga kurang mampu dan rentan, pemerintah kembali menyelenggarakan program BLT tetapi dengan sebutan yang berbeda, yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Mekanisme BLSM secara garis besar hampir sama seperti BLT. Pemerintah mengeluarkan anggaran Rp. 3,8 triliun untuk program ini, dengan sasaran 18,5 juta keluarga miskin. Bantuan ini dibagikan selama empat bulan yang perbulannya sebesar Rp 150.000, per keluarga. Bantuan ini didistribusikan oleh PT. Pos Indonesia (Suari & Giri, 2021).
- 4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020
 Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang besar tidak hanya di bidang kesehatan, namun telah berdampak juga bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan diberlakukannya Permendes PDPTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDPTT Nomor 11 Tahun 2019

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa (Suari dan Giri, 2021).

Secara istilah etimologi persepsi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *perception* yang artinya tanggapan, daya memahami atau daya menanggapi sesuatu. Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam pikirannya manusia. Melalui persepsi masyarakat terus-menerus melakukan hubungan dengan lingkungan dan hubungan ini dilakukan dengan indera mereka sendiri, yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan penciuman. Persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi sosial yang dimaksud yaitu aktivitas mempersepsikan orang lain dan berusaha mencari tahu serta mengerti orang lain. Persepsi sosial kita berusaha mengetahui yang dipikirkan, dipercaya, dirasakan, diniatkan, dikehendaki, dan didambakan orang lain, membaca yang ada dalam diri orang lain berdasarkan ekspresi wajah, tekanan suara, gerak-gerik tubuh, kata-kata, dan tingkah laku mereka, serta menyesuaikan tindakan sendiri dengan keberadaan orang lain berdasarkan pengetahuan dan pembacaan terhadap orang tersebut (Sarwono, Sarlito, dan Eko, 2011).

Menurut Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy menyatakan ekonomi Islam adalah respon pemikiran muslim tentang ekonomi pada manusia tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al Qur'an dan Sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman (Edwin, 2006). Harith bin Asad Al-Muhasibi menulis buku berjudul *Al Makasib* yang membahas cara-cara pendapatan sebagai mata pencarian melalui perdagangan, industri dan kegiatan ekonomi produktif lainnya. Pendapatan ini harus diperoleh secara baik dan tidak melampaui batas/berlebihan. Laba dan upah tidak boleh di pungut atau dibayar secara zalim, Harith menganjurkan agar masyarakat harus saling bekerja sama dan mengutuk sikap pedagang yang melanggar hukum demi mencari keuntungan. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang multidimensi/ interdisiplin, komprehensif, dan saling terintegrasi, meliputi ilmu Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga ilmu rasional (hasil pemikiran dan pengalaman manusia), dengan ilmu ini manusia dapat mengatasi masalah-masalah keterbatasan sumber daya untuk mencapai falah/kebahagiaan (Rivai, 2009). Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan pada Al-Qur'an dan Sunnah seperti memenuhi kebutuhan dasar manusia, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang kebebasan untuk memenuhi nilai-nilai moral (Rianto, 2015).

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara melalui penyebaran kuisioner dan wawancara langsung kepada masyarakat yang menerima dana bantuan langsung tunai (BLT) di kecamatan Glumpang Baro kabupaten Pidie, jumlah masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai dengan jumlah keseluruhan 991 orang dari 21 desa di kecamatan Glumpang Baro kabupaten Pidie. Data sekunder diperoleh melalui dokumen yang telah ada yang dapat mendukung penelitian ini, seperti data dari web Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjelaskan tentang presentase tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Glumpang Baro kabupaten Pidie. Kelompok masyarakat yang dipilih sebagai objek penelitian yaitu masyarakat yang mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di dasarkan atas pertimbangan bahwa kecamatan Glumpang Baro merupakan daerah yang umumnya

berprofesi sebagai petani, sebagian kecil sebagai nelayan, pedagang, wiraswasta, tukang, pandai besi, pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/POLRI. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin dengan kelonggaran penarikan sampel sebesar 5%. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat kecamatan Glumpang Baro kabupaten Pidie yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Total masyarakat penerima BLT yang termasuk dalam populasi penelitian ini berjumlah 991 orang. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin, sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 284 responden.

2.1 Uji Komperatif / Uji Mann-Whitney

Amri & Marwiyati (2019), Pengujian hipotesis komparatif berarti pengujian parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi masyarakat terhadap Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan karakteristiknya. Karena data yang diperoleh tidak akan memenuhi asumsi normalitas, maka metode statistik inferensial yang digunakan adalah statistik non parametrik, dalam hal ini adalah uji Mann-Whitney yang lebih dikenal juga dengan U-Tes. Mann Whitney U Test adalah uji non parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median 2 kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval/rasio tetapi tidak berdistribusi normal. Berdasarkan definisi di atas, uji Mann Whitney U Test mewajibkan data berskala ordinal, interval atau rasio. Apabila data normal, maka distribusinya tidak normal. Sumber data adalah 2 kelompok yang berbeda, misal kelas A dan kelas B di mana individu atau objek yang diteliti adalah objek yang berbeda satu sama lain. Uji Mann Whitney dirumuskan sebagai berikut:

$$Z = \frac{U - n_1 n_2 / 2}{\sqrt{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1) / 12}}$$

Nilai U dicari dengan rumus:

$$U = n_1 n_2 + n_1 (n_1 + 1) - \sum R_1$$

Dimana U adalah Nilai U-test; R adalah skor alternatif pilihan jawaban terhadap variabel persepsi masyarakat. n_1 adalah jumlah populasi yang termasuk dalam kelompok karakteristik responden pertama; dan, n_2 adalah jumlah populasi yang termasuk dalam kelompok karakteristik responden kedua. Pengujian ada atau tidaknya perbedaan persepsi masyarakat berdasarkan karakteristi responden penerima BLT-DD, didasarkan pada perbandingan nilai Z-hitung (yang diperoleh dengan rumus seperti ditunjukkan di atas), dengan nilai kritis Z untuk dua ekor (two-tailed) pada tingkat keyakinan 95 persen. Ketentuan pengujian sebagai berikut:

- 1) Apabila besaran nilai statistik hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai statistik tabel ($Z\text{-hitung} > Z\text{-tabel}$), berarti terdapat perbedaan persepsi masyarakat terhadap dana BLT-DD berdasarkan karakteristiknya.
- 2) Apabila besaran nilai statistik hitung lebih kecil dibandingkan nilai statistik tabel ($Z\text{-hitung} > Z\text{-tabel}$), berarti tidak terdapat perbedaan persepsi masyarakat terhadap dana BLT-DD berdasarkan karakteristiknya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Proses Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Adapun proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie dilakukan secara langsung oleh pemerintahan desa seperti yang dikatakan oleh salah satu Sekretaris Desa Reza Saputra di Kecamatan Glumpang Baro, melalui beberapa proses sesuai dengan pedoman panduan penyaluran BLT yaitu : diawali dengan mekanisme menerbitkan SK penunjukan relawan Desa atau Gugus tugas Covid-19 , selanjutnya pendataan keluarga calon penerima manfaat BLT- Dana Gampong yang dilakukan oleh Relawan Gampong Lawan COVID-19, pendataan terfokus mulai dari dusun (Jurong) sampai ke gampong, kemudian hasil pendataan dibahas dalam forum musyawarah gampong khusus/musyawarah insidental untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang ditetapkan oleh Keuchik Gampong serta dokumen yang sudah ditanda tangani oleh Keuchik Gampong disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan. Setelah pengesahan penetapan data keluarga penerima manfaat BLT-Dana Gampong oleh Camat atas nama Bupati, Keuchik Gampong dapat menyalurkan BLT-Dana Gampong dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Masa Penyaluran BLT-Dana Gampong dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020
- 2) Besaran BLT-Dana Gampong ditetapkan sebesar:
 - a) 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei dan Juni) dalam bentuk uang.
 - b) 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus dan September) dalam bentuk uang.
- 3) BLT-Dana Gampong dapat disalurkan sepanjang Dana Gampong Tahun Anggaran 2020/2021 masih tersedia.
- 4) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Gampong merupakan masyarakat yang sudah mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui musyawarah Gampong khusus.

Untuk pengambilan BLT-DD di Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie di laksanakan di Meunasah (Tempat Ibadah) setiap masing-masing desa sebagaimana diungkapkan oleh Amri Keuchik salah satu desa dikecamatan Glumpang baro. Penyaluran BLT- Dana Desa ini dilakukan secara tunai kepada penerima BLT dengan syarat harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektivitas, serta mengikuti protokol kesehatan penanganan Covid- 19, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan memakai masker. Penyaluran BLT-Dana Desaini dibuktikan dengan laporan pelaksanaan yang harus ditanda tangani oleh penerima BLT itu sendiri.

3.2 Persepsi Masyarakat Terhadap Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Persepsi masyarakat terhadap Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) didekati dengan penilaian mereka terhadap empat dimensi persepsi masyarakat yaitu persepsi manfaat, persepsi keadilan, persepsi keterbukaan informasi dan persepsi proses penyaluran. Berdasarkan hasil pengolahan data, diantara empat dimensi tersebut, persepsi manfaat merupakan persepsi sangat menentukan dibandingkan dengan persepsi lain. Hal ini disebabkan nilai rerata skor terhadap dimensi persepsi manfaat pada indikator meningkatkan kesejahteraan sebesar 4,36 lebih besar apabila dibandingkan dengan tiga dimensi persepsi lainnya. Tabel 2 memperlihatkan nilai rerata skor tingkat kesetujuan masyarakat atas pertanyaan yang berhubungan dengan empat dimensi persepsi terhadap BLT-DD dalam meningkatkan perekonomian keluarga ditinjau dari prespektf ekonomi Islam. Setelah persepsi manfaat utama dalam

meningkatkan, dimensi berikutnya adalah persepsi keadilan, kemudian persepsi keterbukaan informasi dan yang terakhir persepsi proses penyaluran. Untuk lebih jelasnya mengenai deskripsi jawaban/ nilai rerata dimensi persepsi masyarakat terhadap BLT DD dalam meningkatkan perekonomian keluarga dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Dimensi Persepsi Masyarakat

No	Persepsi Masyarakat	Indikator	Nilai Rerata Skor	Keterangan Persepsi
1	Persepsi manfaat	Membantu pemenuhan kebutuhan keluarga	4,27	Persepsi Paling menentukan diantara semua persepsi adalah persepsi manfaat pada indikator meningkatkan kesejahteraan, kemudian diikuti indikator membantu pemenuhan keluarga, dan kepuasan penerima BLT. Selanjutnya Persepsi Keadilan pada indikator Kesamaan waktu penyaluran dan Persepsi keterbukaaninformasi pada indikator keterbukaan tentang data penerima
		Kepuasan penerima BLT	4,22	
		Meningkatkan kesejahteraan	4,36	
		Mengurangi kemiskinan	4,02	
2	Persepsi Keadilan	Tidak ada diskriminasi dalam penetapan penerima BLT	4,03	
		Tidak ada diskriminasi dalam besaran nominal BLT	4,06	
		Kesamaan waktu penyaluran BLT	4,16	
		Kesamaan perlakuan dalam proses administrasi	4,04	
3	Persepsi Keterbukaan Informasi	Kejelasan dan akurasi informasi	4,05	
		keterbukaan tentang data penerima	4,11	
4	Persepsi Proses Penyaluran	Transparansi dalam proses penyaluran	4,04	
		ketepatan waktu penyaluran	4,08	
		sesuai prosedur	4,05	

3.3 Hasil Uji Komperatif / Uji Mann-Whitney Dimensi Persepsi Masyarakat

Uji Mann-Whitney atau yang lebih dikenal juga dengan U-Tes. Mann Whitney U Test adalah uji non parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median 2 kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval/rasio tetapi tidak berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya mengenai uji beda dimensi persepsi masyarakat berdasarkan karakteristik penerima BLT-DD dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Dimensi Persepsi Masyarakat

No	Dimensi Persepsi	Karakteristik Penerima BLT-DD	Nilai Z-hitung	Sig	Harga Kritis Z (Z-tabel)	Keterangan		
1	Persepsi Manfaat (PM)	Jenis Kelamin - Laki-laki - Perempuan	0,222	0,825	1,960	Tidak berbeda signifikan		
		Usia - <40 Tahun - >40 Tahun	1,529	0,126	1,960	Tidak berbeda signifikan		
		Pekerjaan -Petani/Pekebun -Bukan Petani/Pekebun	0,527	0,127	1,960	Tidak berbeda signifikan		
		Status Perkawinan -Menikah -Bukan Menikah	0,205	0,838	1,960	Tidak berbeda signifikan		
		Tingkat Pendidikan -SMP kebawah -SMA keatas	0,982	0,326	1,960	Tidak berbeda signifikan		
		Jumlah Anggota Keluarga -Dibawah 4 Orang - 4 Orang Keatas	4,056	0,000	1,960	Berbeda signifikan		
		Pendapatan Rata-rata Perbulan - Rp100.000- Rp500.000 - Diatas Rp500.000	3,835	0,000	1,960	Berbeda signifikan		
		Frekuensi Menerima BLT-DD - 1 Periode -2 Periode	1,393	0,164	1,960	Tidak berbeda signifikan		
		2	Persepsi Keadilan (PK)	Jenis Kelamin - Laki-laki - Perempuan	1,393	0,164	1,960	Tidak berbeda signifikan
				Usia - <40 Tahun - >40 Tahun	1,458	0,145	1,960	Tidak berbeda signifikan
Pekerjaan -Petani/Pekebun -Bukan	0,216			0,829	1,960	Tidak berbeda signifikan		

No	Dimensi Persepsi	Karakteristik Penerima BLT-DD	Nilai Z-hitung	Sig	Harga Kritis Z (Z-tabel)	Keterangan
		Petani/Pekebun				
		Status Perkawinan -Menikah -Bukan Menikah	0,631	0,528	1,960	Tidak berbeda signifikan
		Tingkat Pendidikan -SMP kebawah -SMA keatas	0,845	0,398	1,960	Tidak berbeda signifikan
		Jumlah Anggota Keluarga -Dibawah 4 Orang - 4 Orang Keatas	2,991	0,003	1,960	Berbeda signifikan
		Pendapatan Rata-rata Perbulan - Rp100.000- Rp500.000 - Diatas Rp500.000	3,989	0,323	1,960	Berbeda signifikan
		Frekuensi Menerima BLT-DD - 1 Periode -2 Periode	0,731	0,465	1,960	Tidak berbeda signifikan
3	Pesepsi Keterbukaan Informasi (PKI)	Jenis Kelamin - Laki-laki - Perempuan	2,072	0,038	1,960	Berbeda signifikan
		Usia - <40 Tahun - >40 Tahun	1,368	0,171	1,960	Tidak berbeda signifikan
		Pekerjaan -Petani/Pekebun -Bukan Petani/Pekebun	0,429	0,668	1,960	Tidak berbeda signifikan
		Status Perkawinan -Menikah -Bukan Menikah	1,003	0,316	1,960	Tidak berbeda signifikan
		Tingkat Pendidikan -SMP kebawah -SMA keatas	1,198	0,231	1,960	Tidak berbeda signifikan
		Jumlah Anggota Keluarga -Dibawah 4 Orang - 4 Orang Keatas	4,176	0,000	1,960	Berbeda signifikan
		Pendapatan Rata-rata Perbulan - Rp100.000- Rp500.000 - Diatas Rp500.000	0,080	0,936	1,960	Tidak berbeda signifikan
		Frekuensi Menerima BLT-DD - 1 Periode	1,066	0,286	1,960	Tidak berbeda signifikan

No	Dimensi Persepsi	Karakteristik Penerima BLT-DD	Nilai Z-hitung	Sig	Harga Kritis Z (Z-tabel)	Keterangan
-2 Periode						
4	Persepsi Proses Penyaluran (PPP)	Jenis Kelamin - Laki-laki - Perempuan	0,148	0,882	1,960	Tidak berbeda signifikan
		Usia - <40 Tahun - >40 Tahun	1,223	0,221	1,960	Tidak berbeda signifikan
		Pekerjaan -Petani/Pekebun -Bukan Petani/Pekebun	0,523	0,601	1,960	Tidak berbeda signifikan
		Status Perkawinan -Menikah -Bukan Menikah	0,828	0,408	1,960	Tidak berbeda signifikan
		Tingkat Pendidikan -SMP kebawah -SMA keatas	0,812	0,417	1,960	Tidak berbeda signifikan
		Jumlah Anggota Keluarga -Dibawah 4 Orang - 4 Orang Keatas	1,480	0,139	1,960	Tidak berbeda signifikan
		Pendapatan Rata-rata Perbulan - Rp100.000- Rp500.000 - Diatas Rp500.000	1,192	0,233	1,960	Tidak berbeda signifikan
		Frekuensi Menerima BLT-DD - 1 Periode -2 Periode	0,757	0,449	1,960	Tidak berbeda signifikan

Dari keterangan tabel 3 pada dimensi Persepsi Manfaat (PM) dapat diketahui bahwa pengujian apakah ada perbedaan persepsi masyarakat menurut karakteristik penerima BLT-DD di dalam membantu pemenuhan kebutuhan keluarga, masyarakat tersebut hanya dikelompokkan dalam dua kelompok pada setiap karakteristiknya hal ini disebabkan uji MannWhitney hanya bisa digunakan untuk membedakan dua jenis kelompok data. Maka bisa dilihat pada tabel diatas bahwa ada delapan jenis karakteristik masyarakat yang di uji, enam diantaranya (jenis kelamin, usia, pekerjaan, status perkawinan, tingkat pendidikan dan frekuensi menerima BLT) menunjukkan nilai Z-hitung < Z-tabel. Pengujian dilakukan untuk dua sisi yang berarti adalah sisi kiri dan sisi kanan. Nilai kritis Z untuk tes dua sisi pada signifikansi 5% atau tingkat keyakinan sebesar 95 persen. Dengan kata lain, tidak adanya perbedaan persepsi manfaat terhadap BLT-DD di dalam membantu pemenuhan kebutuhan keluarga dari enam karakteristik tersebut sehingga dapat juga diinterpretasikan bahwa ke enam karakteristik tersebut hasilnya relatif sama. Kemudian dimensi Persepsi Manfaat (PM) terdapat dua karakteristik adanya perbedaan persepsi manfaat dalam membantu pemenuhan kebutuhan keluarga yaitu pada karakteristik jumlah anggota keluarga, hasil pengujian menunjukkan nilai Z-hitung sebesar -4,056 (dalam hal ini nilai negatif

diabaikan karena pengujian dilakukan dua sisi). Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan nilai Z-tabel sebesar 1,960, sehingga dapat diartikan terdapat perbedaan persepsi masyarakat terhadap BLT-DD di dalam membantu pemenuhan kebutuhan keluarga berdasarkan jumlah anggota keluarga mereka. Dengan kata lain, masyarakat dengan jumlah anggota keluarga dibawah 4 orang memiliki persepsi masyarakat yang berbeda terhadap BLT-DD di dalam membantu pemenuhan kebutuhan keluarga dengan masyarakat yang jumlah anggota keluarga 4 orang keatas. Dan karakteristik kedua yaitu pendapatan rata-rata per bulan juga memiliki persepsi masyarakat yang berbeda terhadap BLT-DD di dalam membantu pemenuhan kebutuhan keluarga.

Masyarakat yang memiliki pendapatan rata-rata Rp100.000 - Rp500.000 per bulan berbeda signifikan dengan masyarakat yang pendapatan rata-rata diatas Rp500.000 per bulan dengan nilai Z-hitung sebesar 3,835. Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan nilai Z-tabel sebesar 1,960. Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap bantuan langsung tunai memberi manfaat serta meningkat perekonomian bagi masyarakat Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie menurut 6 karakteristik penerima BLT kecuali ada perbedaan persepsi pada karakteristik jumlah anggota keluarga dan pendapatan rata-rata perbulan. Selanjutnya pada Persepsi Keadilan (PK), sama halnya dengan Persepsi Manfaat yaitu bisa dilihat pada tabel diatas bahwa ada delapan jenis karakteristik masyarakat yang di uji, enam diantaranya (jenis kelamin, usia, pekerjaan, status perkawinan, tingkat pendidikan dan frekuensi menerima BLT) menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan terhadap BLT, hanya pada karakteristik jumlah anggota keluarga dan pendapatan rata-rata perbulan yang memiliki perbedaan yang signifikan terhadap BLT. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang jumlah anggotanya keluarganya 4 orang keatas memiliki persepsi yang berbeda terhadap keadilan pada BLT dibandingkan dengan masyarakat yang jumlah anggotanya 4 orang kebawah. Begitu juga dengan masyarakat yang berpendapatan RP100.000 – RP500.000 memiliki persepsi yang berbeda terhadap keadilan pada BLT dengan masyarakat yang berpendapatan lebih dari RP500.000 perbulan.

Dimensi persepsi masyarakat yang ketiga adalah Persepsi Keterbukaan Informasi (PKI), maka dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat dua karakteristik yang ada perbedaan signifikan yaitu karakteristik Jenis Kelamin dan Jumlah Anggota Keluarga. Dengan kata lain adanya perbedaan persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi BLT pada karakteristik jenis kelamin atau antara laki-laki dan perempuan dan pada karakteristik jumlah anggota keluarga atau antara jumlah anggota keluarga 4 kebawah dan jumlah anggota keluarga 4 keatas. Dan dimensi masyarakat yang terakhir yaitu Persepsi Proses Penyaluran (PPP), dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap proses penyaluran BLT dari delapan karakteristik tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran BLT dilaksanakan dengan sebenar-benarnya tanpa membedakan antara masyarakat A dengan masyarakat B.

Meningkatnya perekonomian masyarakat/keluarga yang ditandai meningkatnya kesejahteraan dan kualitas kehidupan yang layak dan bermamfaat serta memberi perhatian utama pada tercukupnya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. Dalam hal ini banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat miskin, seperti bantuan langsung tunai (BLT), dalam ekonomi Islamnya dikenal dengan Hibah yaitu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam meningkatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan balasan apapun (hasan, 2003).

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Masyarakat Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie), maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Proses penyaluran BLT- Dana Desa ini dilakukan secara tunai kepada penerima BLT dengan syarat harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektivitas, serta mengikuti protokol kesehatan penanganan Covid- 19, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan memakai masker. Penyaluran BLT-Dana Desa ini dibuktikan dengan laporan pelaksanaan yang harus ditanda tangani oleh penerima BLT itu sendiri. Bantuan ini disalurkan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima BLT dengan jumlah penerima yang telah ditetapkan setiap periode oleh Aparat Desa masing-masing. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Desa di Kecamatan Glumpang Baro benar-benar meninjau setiap periode/setahun sekali dalam pendataan penerima BLT tersebut, sehingga proses penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tepat dan sesuai sasaran penerima BLT.
- 2) Persepsi masyarakat terhadap Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) didekati dengan penilaian mereka terhadap empat dimensi persepsi masyarakat yaitu persepsi manfaat, persepsi keadilan, persepsi keterbukaan informasi dan persepsi proses penyaluran. Berdasarkan hasil pengolahan data, diantara empat dimensi tersebut, persepsi manfaat merupakan persepsi sangat menentukan dibandingkan dengan persepsi lain. Hal ini disebabkan nilai rerata skor terhadap dimensi persepsi manfaat pada indikator meningkatkan kesejahteraan sebesar 4,36 lebih besar apabila dibandingkan dengan tiga dimensi persepsi lainnya. Dengan demikian ada kecenderungan atau Persepsi utama dalam meningkatkan perekonomian yaitu persepsi manfaat itu sendiri.
- 3) Pada uji beda dimensi persepsi masyarakat, bahwa adanya perbedaan persepsi bagi masyarakat yang jumlah anggota keluarganya 4 orang keatas dengan masyarakat yang jumlah anggota keluarganya 4 orang kebawah terhadap BLT dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Begitu juga dengan masyarakat yang pendapatan rata-rata RP 100.000- 500.000 perbulan memiliki persepsi yang berbeda dengan pendapatan rata-rata perbulan RP. 500.000 terhadap BLT dalam meningkatkan perekonomian keluarga. maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap bantuan langsung tunai memberi manfaat serta meningkat perekonomian bagi masyarakat Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie menurut 6 karakteristik penerima BLT kecuali ada perbedaan persepsi pada karakteristik jumlah anggota keluarga dan pendapatan rata-rata perbulan.

Referensi

- Akib, I., & Risfaisal, R. (2015). Bantuan langsung tunai. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i2.283>.
- Amri, K., & Marwiyati, M. (2019). Preferensi Muzakki Membayar Zakat Melalui Baitul Mal: Studi Empiris di Kota Banda Aceh. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(2), 386-391. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/jmas.v4i2.123>.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. RajaGrafindo Persada.
- Maladministrasi, B. L. T. (2021). Analisis Terhadap Potensi Maladministrasi Bantuan

Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Selama Pandemi Covid-19.

- Muliadi, M., & Amri, K. (2019). Penerimaan zakat dan penurunan kemiskinan di Aceh: Peran dana otonomi khusus sebagai pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 231-244. DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i3.706>.
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan: Model pengukuran, permasalahan dan alternatif kebijakan. *jurnal kependudukan padjadjaran*, 10(1), 1.
- Pratama, Y. C. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(2). DOI: <https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966>.
- Sarwono, S. (2011). W & Meinarno, Eko. *Psikologi Sosial*.
- Sudarsono, H. (2002). *Konsep ekonomi Islam: suatu pengantar*. Ekonisia.
- Sudirman, S. STUDI PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA ALO'O DAN DESA OGOLUGUS KECAMATAN AMPIBABO KABUPATEN PARIGI MOUTONG (STUDI KASUS DESA PEGUNUNGAN DAN DESA PESISIR). *Katalogis*, 2(7).
- Sunu, M. K. K., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(8), 843-872.